

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Sektor Basis dan Non Basis di Kabupaten Belu

Untuk menentukan suatu sektor ekonomi di suatu wilayah yang merupakan sektor basis atau non basis, digunakan analisis LQ (Location Quotient). Teknik analisis ini membandingkan tentang besarnya peranan suatu sektor di suatu daerah (kabupaten) terhadap besarnya peranan sektor tersebut di tingkat provinsi. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi internal yang dimiliki daerah tersebut yaitu sektor basis dan non basis. Jika indeks $LQ > 1$ maka sektor tersebut merupakan sektor basis, $LQ = 1$ maka sektor tersebut hanya mampu memenuhi permintaan di wilayahnya, sedangkan $LQ < 1$ maka sektor tersebut merupakan sektor non basis.

Setelah mengelolah data PDRB per sektor maka dihasilkan nilai indeks Location Quotient seperti yang terlihat pada tabel 5.1 berikut ini :

5.1.1 LQ Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Tabel 5.1
Indeks Location Quotient Kabupaten Belu Tahun
2011-2015

Lapangan Usaha		Tahun					Klasifikasi Sektor
		2011	2012	2013	2014	2015	
A	Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan	0,93	0,94	0,95	0,976	0,97	NON BASIS
B	Pertambangan Dan Penggalian	0,56	0,67	0,58	0,61	0,63	NON BASIS
C	Industri Pengolahan	0,72	0,73	0,75	0,76	0,77	NON BASIS
D	Pengadaan Listrik Dan Gas	0,97	0,94	0,91	0,92	0,91	NON BASIS
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	0,41	0,42	0,43	0,44	0,42	NON BASIS
F	Konstruksi	0,55	0,56	0,55	0,54	0,55	NON BASIS
G	Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mmobil Dan Sepeda Motor	0,72	0,73	0,72	0,71	0,71	NON BASIS
H	Transportasi Dan Pergudangan	1,12	1,13	1,14	1,13	1,13	BASIS
I	Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	NON BASIS
J	Informasi Dan Komunikasi	0,64	0,65	0,64	0,64	0,62	NON BASIS
K	Jasa Keuangan Dan Asuransi	1,18	1,17	1,18	1,15	1,14	BASIS
L	Real Estat	1,22	1,22	1,23	1,25	1,34	BASIS
MN	Jasa Perusahaan	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	NON BASIS
O	Administrasi Pemerintahan , Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	1,34	1,35	1,34	1,34	1,35	BASIS
P	Jasa Pendidikan	1,61	1,58	1,56	1,57	1,56	BASIS
Q	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	1,14	1,13	1,13	1,10	1,10	BASIS
RSTU	Jasa Lainnya	2,03	2,06	2,08	2,05	2,03	BASIS

Sumber : Hasil Olahan Data Sekunder 2017

Tabel 5.1
Perkembangan LQ Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan



Sumber : Hasil Olahan Data Sekunder 2017

Pada grafik perkembangan di atas, menunjukkan LQ sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Namun terjadi penurunan pada tahun 2015 sebesar 0,96 persen, dengan memiliki indeks nilai ($LQ < 1$). Hal ini berarti bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dikategorikan dalam sektor non basis atau sektor yang belum mampu memenuhi permintaan dalam daerahnya.

5.1.2 LQ Sektor Pertambangan dan Penggalian

Grafik 5.2
Perkembangan LQ Sektor Pertambangan dan Penggalian

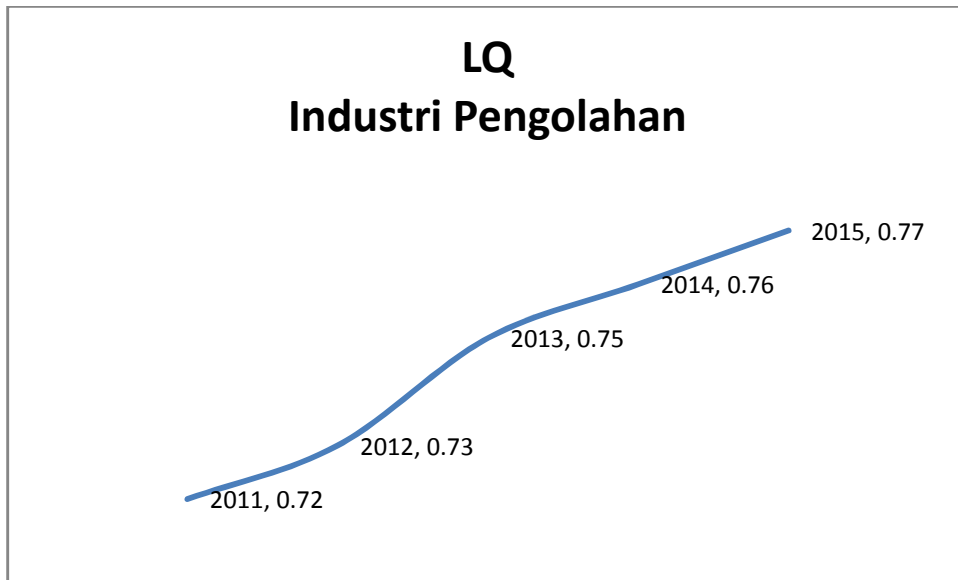


Sumber : Hasil Olahan Data Sekunder 2017

Pada grafik perkembangan di atas, menunjukkan LQ sektor pertambangan dan penggalian mengalami Deflasi. LQ sektor pada tahun 2011 sebesar 0,56 persen dan naik pada tahun 2012 sebesar 0,67 persen, namun menurun pada tahun 2013 sebesar 0,58 persen. Kemudian naik kembali pada tahun 2014 sebesar 0,61 persen dan 2015 sebesar 0,63 persen, dengan indeks nilai ($LQ < 1$), yang artinya jika di lihat sektor tersebut dikategorikan dalam sektor non basis atau sektor yang belum mampu memenuhi permintaan dalam daerahnya.

5.1.3 LQ Sektor Industri Pengolahan

Grafik 5.3
Perkembangan LQ Sektor Industri Pengolahan

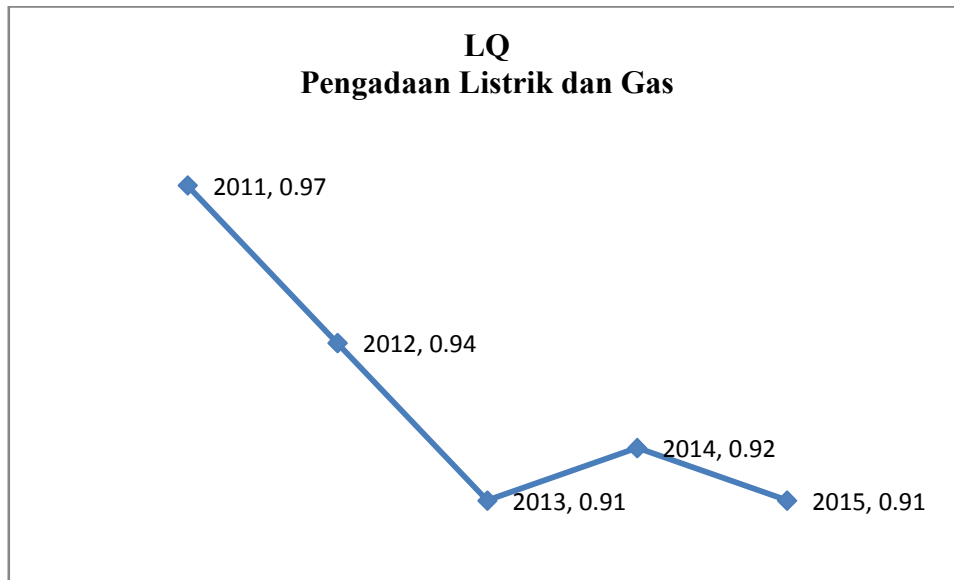


Sumber : Hasil Olahan Data Sekunder 2017

Pada grafik perkembangan di atas, menunjukkan indeks LQ sektor industri pengolahan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun indeks LQ sektornya masih memiliki nilai ($LQ < 1$), sehingga sektor industri pengolahan dikategorikan dalam sektor non basis atau sektor yang belum mampu memenuhi permintaan dalam daerahnya.

5.1.4 LQ Sektor Pengadaan Listrik dan Gas

Grafik 5.4
Perkembangan LQ Sektor Pengadaan Listrik dan Gas

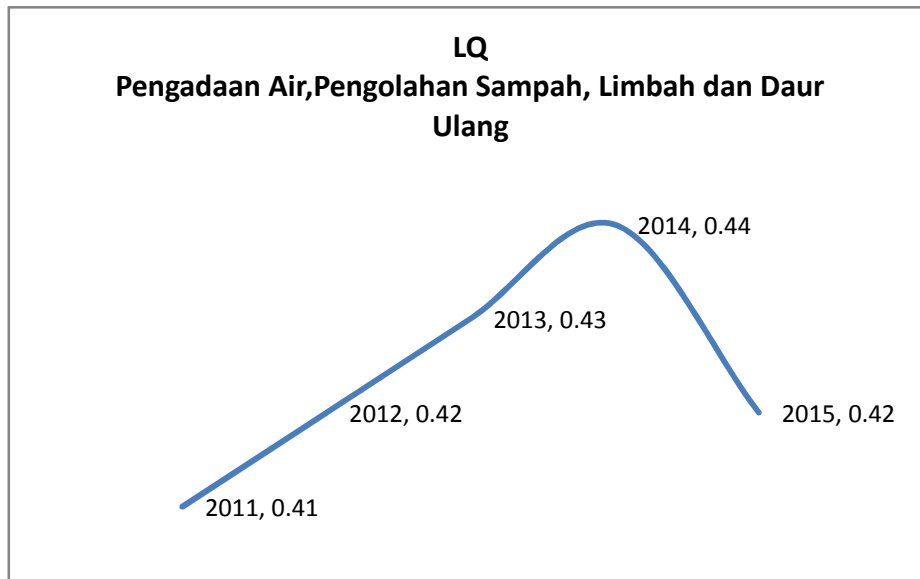


Sumber : Hasil Olahan Data Sekunder 2017

Pada grafik perkembangan di atas, menunjukkan pada tahun 2011 perkembangan LQ sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 0,97 persen. Namun mengalami penurunan dari tahun 2012 sebesar 0,94 persen dan 0,91 persen pada tahun 2013. Kemudian naik kembali pada tahun 2014 sebesar 0,92 persen dan pada akhirnya menurun kembali menjadi 0,91 persen pada tahun 2015, dengan indeks nilai ($LQ < 1$), akibatnya sektor pengadaan listrik dan gas dikategorikan dalam sektor non basis atau sektor yang belum mampu memenuhi kebutuhan dalam daerahnya sehingga membutuhkan sumbangan atau bantuan dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah.

5.1.5 LQ Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Grafik 5.5
Perkembangan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang

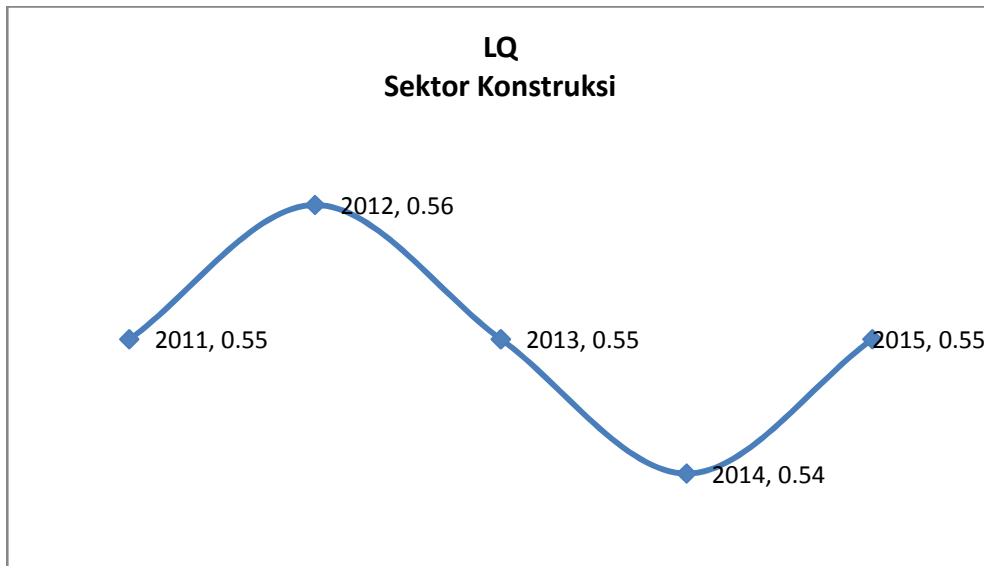


Sumber : Hasil Olahan Data Sekunder 2017

Pada grafik perkembangan di atas, menunjukkan LQ sektor Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Namun terjadi penurunan pada tahun 2015 sebesar 0,42 persen, dengan memiliki indeks nilai ($LQ < 1$). Hal ini berarti bahwa sektor Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dikategorikan dalam sektor non basis atau sektor yang belum mampu memenuhi permintaan dalam daerahnya.

5.1.6 LQ Sektor Konstruksi

Grafik 5.6
Perkembangan LQ Sektor Konstruksi

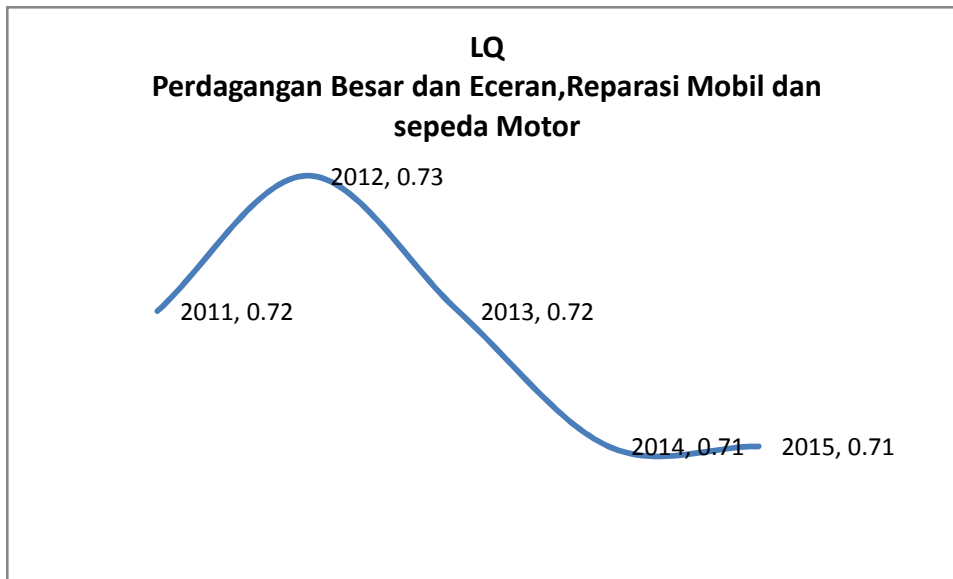


Sumber : Hasil Olahan Data Sekunder 2017

Pada grafik perkembangan di atas, menunjukkan indeks LQ sektor konstruksi di tahun 2011 sebesar 0,55 persen naik lagi di tahun 2012 menjadi 0,56, kemudian perlahan menurun hingga 0,55 persen di tahun 2013 sampai 2014 dan terus naik pada tahun 2015 sebesar 0,55 persen terhadap total output, dengan memiliki indeks nilai ($LQ < 1$), artinya sektor konstruksi dikategorikan dalam sektor non basis atau sektor yang belum mampu memenuhi permintaan dalam daerah sendiri. Untuk memenuhi permintaan di dalam daerah maka harus mengimpor dari luar daerah untuk dapat memenuhi kebutuhan daerahnya.

5.1.7 LQ Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Grafik 5.7
Perkembangan LQ Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

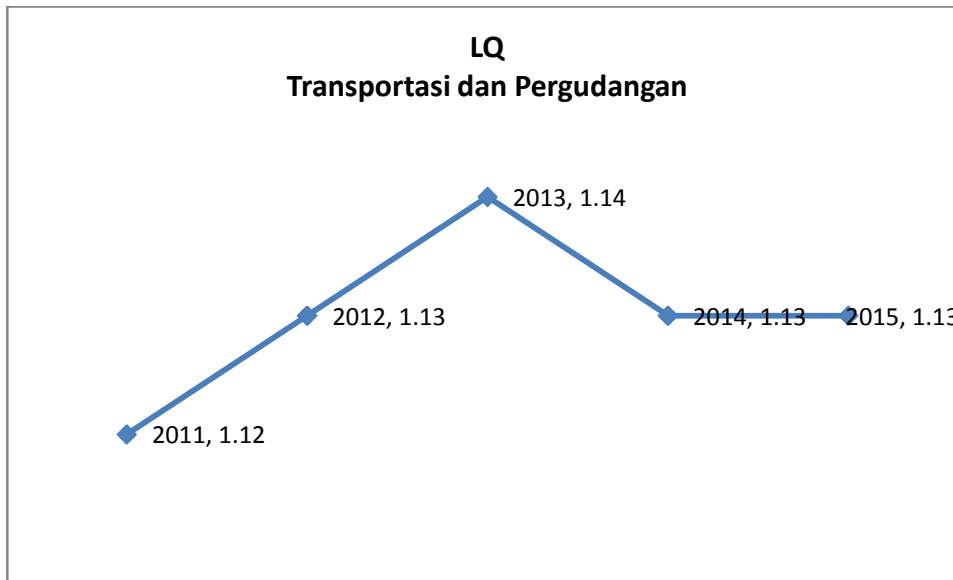


Sumber : Hasil Olahan Data Sekunder 2017

Pada grafik perkembangan di atas, LQ perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dapat dilihat bahwa nilai hasil analisis LQ sektor mengalami fluktuatif. Dimana pada tahun 2011 LQ sektornya sebesar 0,72 persen, kemudian pada tahun 2012 perlahan naik sebesar 0,73 persen. Namun terjadi penurunan dari tahun 2013 hingga tahun 2015, dengan memiliki indeks nilai ($LQ < 1$), maka sektor tersebut dikategorikan dalam sektor non basis yang masih saja belum mampu memenuhi kebutuhan pada daerah sendiri, sehingga membutuhkan impor dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya.

5.1.8 LQ Sektor Transportasi dan Pergudangan

Grafik 5.8
Perkembangan LQ Sektor Transportasi dan Pergudangan

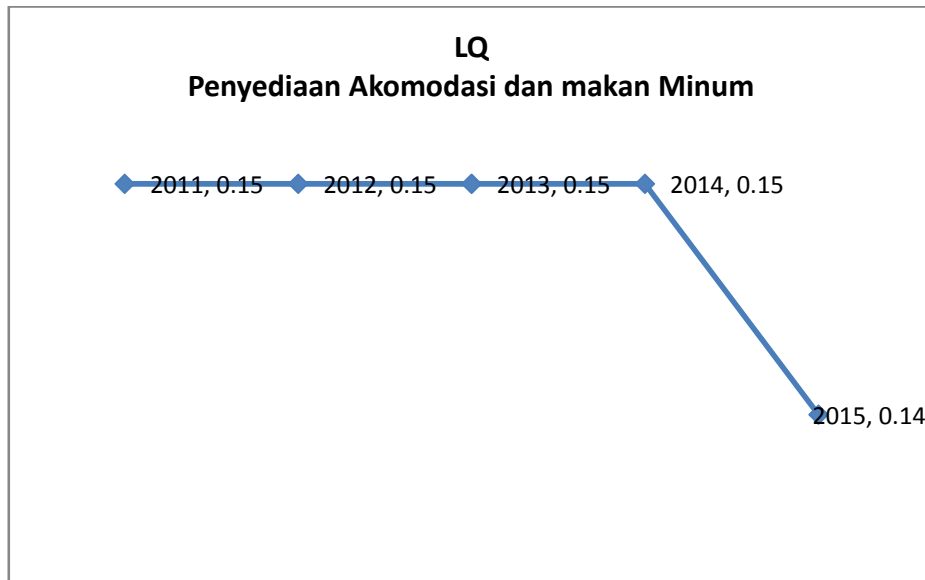


Sumber : Hasil Olahan Data Sekunder 2017

Pada grafik perkembangan di atas, menunjukkan Indeks LQ sektor transportasi dan pergudangan tahun 2011 hingga tahun 2013 mengalami peningkatan mencapai 1,14 persen. Namun sedikit mengalami penurunan hingga pada 2015 sebesar 1,13 persen. Namun perkembangan LQ ini dikategorikan dalam sektor basis dikarenakan sektor tersebut memiliki nilai indeks ($LQ > 1$). Hal ini berarti bahwa sektor transportasi dan pergudangan mampu memenuhi permintaan dalam daerah mampu mengekspor ke luar daerah.

5.1.9 Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Grafik 5.9
Perkembangan LQ Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

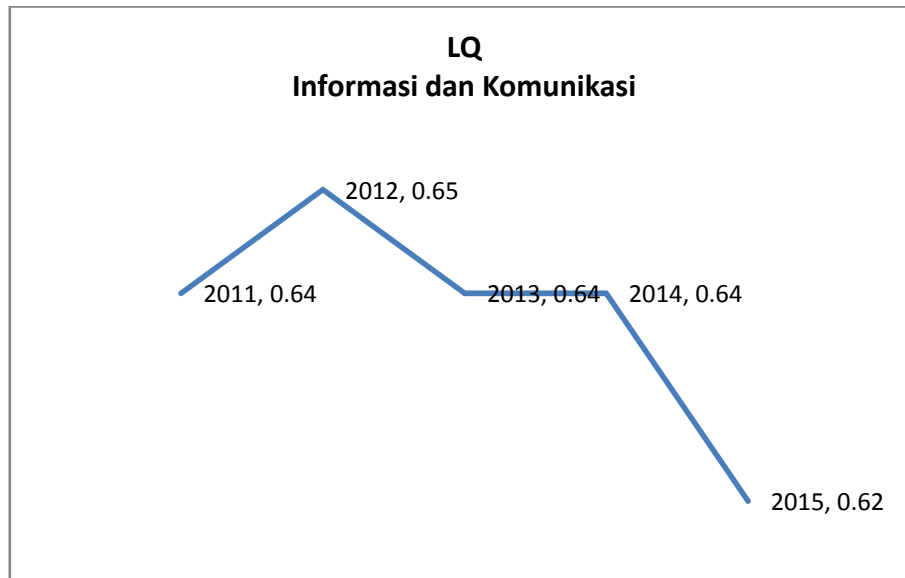


Sumber : Hasil Olahan Data Sekunder 2017

Pada grafik perkembangan di atas, menunjukkan LQ sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Kabupaten Beluselama periode 2011 hingga 2014 tetap konsisten yaitu sebesar 0,15 persen, namun sedikit mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 0,14 persen, dengan memiliki nilai indeks ($LQ < 1$), yang artinya sektor ini dikategorikan sektor non basis atau tidak berpotensi untuk daerahnya, sehingga membutuhkan impor dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan daerahnya.

5.1.10 LQ Sektor Informasi dan Komunikasi

Grafik 5.10
Perkembangan Sektor LQ Informasi dan Komunikasi



Sumber : Hasil Olahan Data Sekunder 2017

Pada grafik perkembangan di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2011 perkembangan LQ sektor informasi dan komunikasi sebesar 0,64 persen. Namun terjadi peningkatan pada tahun 2012, 0,65 persen pada 3 tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2013-2015 mengalami penurunan mencapai 0,62 persen, dengan indeks nilai ($LQ < 1$). Hal ini menunjukkan bahwa LQ sektor informasi dan komunikasi dikategorikan dalam sektor non basis atau sektor yang belum mampu memenuhi kebutuhan daerahnya dan permintaan dari luar daerah.

5.1.11 LQ Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi

Grafik 5.11
Perkembangan LQ Jasa Keuangan dan Asuransi

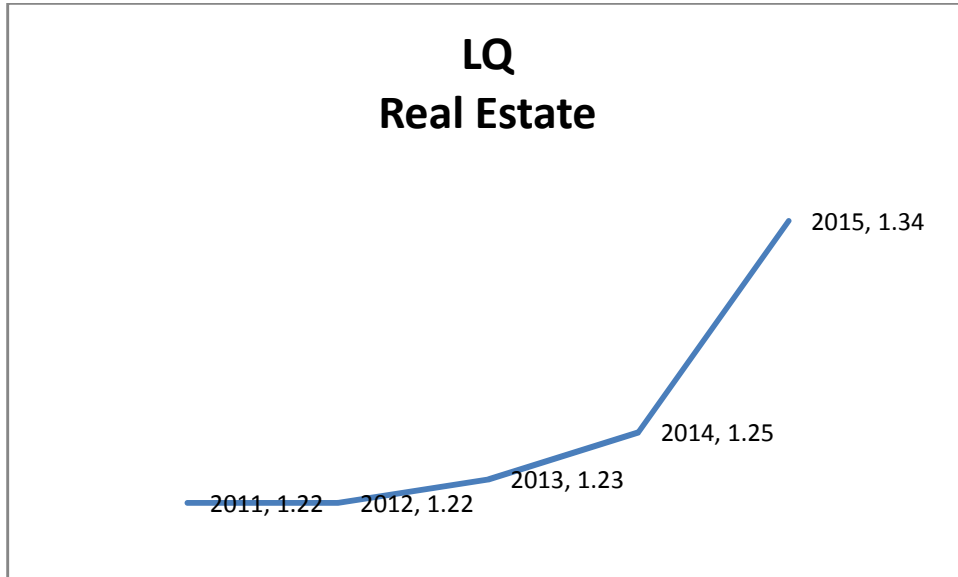


Sumber : Hasil Olahan Data Sekunder 2017

Hasil perkembangan nilai LQ sektor asuransi dan Keuangan Kabupaten Belu menunjukkan perkembangan yang positif walaupun pada tahun 2012 mengalami penurunan dari 1,18 menjadi 1,17. Akan tetapi pada tahun 2013 naik lagi menjadi 1,18 persen dan turun kembali menjadi 1,15 hingga tahun 2015 menjadi 1,14 persen, dengan indeks nilai ($LQ > 1$). Hal ini menunjukkan bahwa sektor jasa keuangan dan asuransi termasuk sektor basis. Artinya sektor ini dapat memenuhi kebutuhan dalam daerah sendiri dan permintaan dari luar daerah.

5.1.12 LQ Sektor Real Estat

Grafik 5.12
Perkembangan LQ Sektor Real Estat

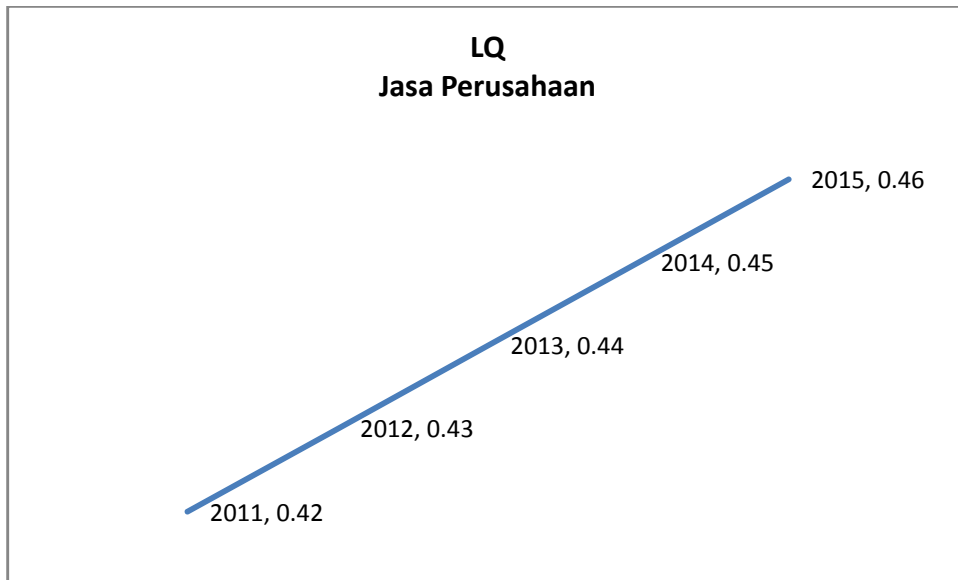


Sumber : Hasil Olahan Data Sekunder 2017

Indeks perkembangan nilai LQ pada sektor real estat menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun yaitu dari tahun 2011 hingga 2015. Dengan kenaikan dari setiap tahunnya menggambarkan indeks nilai ($LQ > 1$). Artinya sektor real estat termasuk dalam sektor basis, yang mana sektor tersebut mampu memenuhi permintaan dalam daerah sendiri maupun dari luar daerah.

5.1.13 LQ Sektor Jasa Perusahaan

Grafik 5.13
Perkembangan LQ Sektor Jasa Perusahaan

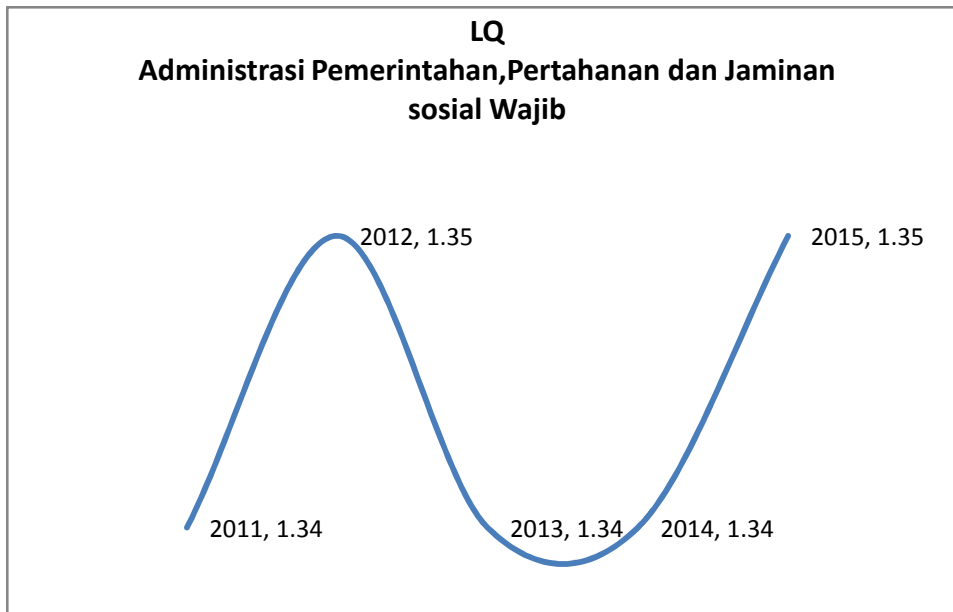


Sumber : Hasil Olahan Data Sekunder 2017

Berdasarkan grafik perkembangan di atas, menunjukkan indeks LQ sektor jasa perusahaan mengalami peningkatan dari tahun 2011-2015. Namun dari hasil analisis ini diperoleh indeks nilai ($LQ < 1$) selama periode analisis. Sehingga sektor jasa perusahaan dikategorikan dalam sektor non basis atau sektor yang belum mampu memenuhi permintaan dalam daerah sendiri maupun permintaan dari luar daerah itu sendiri.

5.1.14 LQ Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Grafik 5.14
Perkembangan LQ Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial Wajib

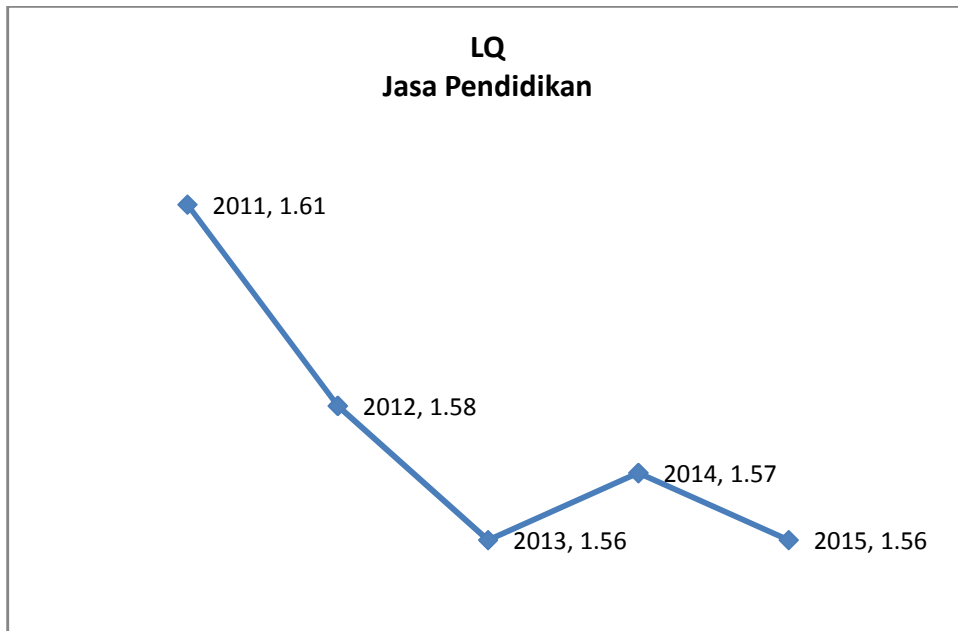


Sumber : Hasil Olahan Data Sekunder 2017

Berdasarkan analisis menunjukkan perkembangan LQ sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib terdapat perkembangan yang cenderung fluktuatif, yaitu dari tahun 2011-2012 sebesar 1,35 persen, kemudian perlahan turun di tahun 2013-2014 sebesar 1,34 persen dan naik kembali pada tahun 2015 sebesar 1,35 persen. Dari hasil perhitungan LQ sektor di peroleh indeks nilai ($LQ > 1$). Artinya bahwa sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dikategorikan dalam sektor basis yang berpotensi untuk memenuhi permintaan baik dalam daerah maupun luar daerah itu sendiri.

5.1.15 LQ Sektor Jasa Pendidikan

Grafik 5.15
Perkembangan LQ Sektor Jasa Pendidikan

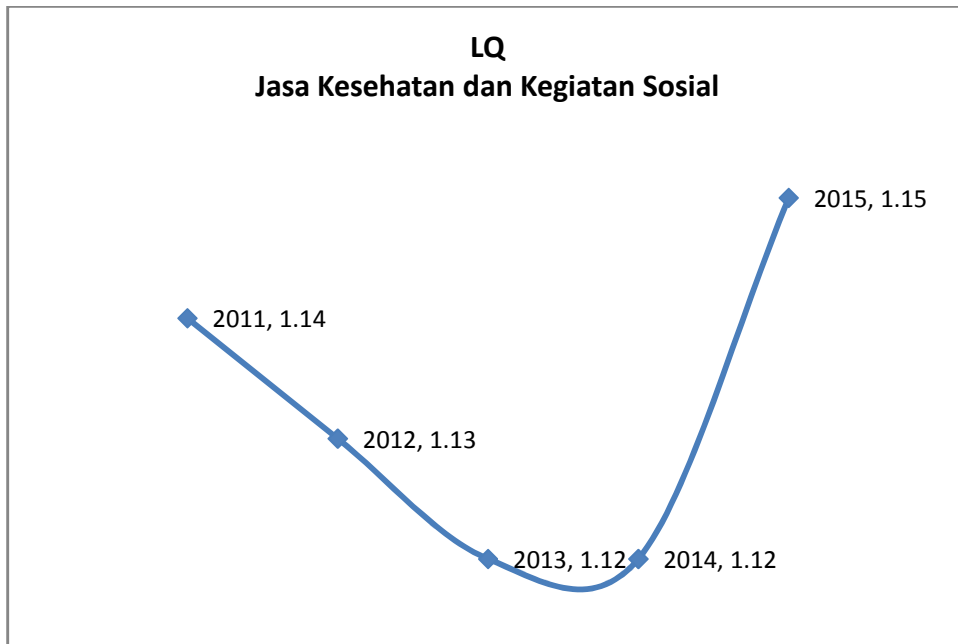


Sumber : Hasil Olahan Data Sekunder 2017

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan perkembangan LQ sektor jasa pendidikan pada tahun 2011 sebesar 1,61 persen, namun mengalami penurunan hingga tahun 2013 sebesar 1,56, dan pada tahun 2012-2013 turun menjadi 1,56 persen. Namun naik kembali menjadi 1,57 persen di tahun 2014 dan turun kembali menjadi 1,56 persen di tahun 2015, dengan memiliki indeks nilai ($LQ > 1$). Hal ini menunjukkan bahwa sektor jasa pendidikan dikategorikan dalam sektor basis atau sektor yang mampu memenuhi permintaan dalam daerah dan mengekspor ke luar daerah.

5.1.16 LQ Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Grafik 5.16
Perkembangan LQ Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

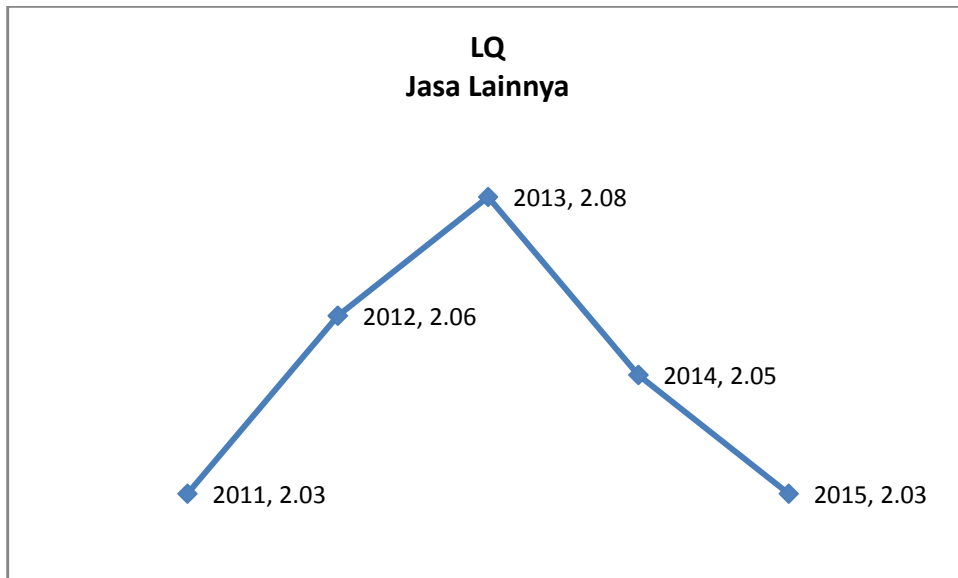


Sumber : Hasil Olahan Data Sekunder 2017

Berdasarkan analisis LQ di peroleh LQ sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang menunjukkan perkembangan yang cenderung fluktuatif yaitu pada tahun 2011 sebesar 1,14 persen, kemudian turun menjadi 1,13 persen di tahun 2012 dan tahun 2014 1,12 persen. Namun naik kembali pada tahun 2015 sebesar 1,15 persen. Dari hasil analisis ini diperoleh indeks nilai ($LQ > 1$), yang artinya sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dikategorikan dalam sektor basis atau sektor yang mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri dan permintaan dari luar daerah.

5.1.17 LQ Sektor Jasa Lainnya

Grafik 5.17
Perkembangan LQ Sektor Jasa Lainnya



Sumber : Hasil Olahan Data Sekunder 2017

Hasil perhitungan nilai LQ Kabupaten Belu selama 2011-2015 yang tergambar pada grafik 5.17, menunjukkan angka yang cenderung fluktuatif dengan indeks nilai ($LQ > 1$). Hal ini menunjukkan bahwa sektor jasa lainnya termasuk dalam sektor basis. Artinya sektor ini dapat memenuhi kebutuhan dalam daerah sendiri dan dapat mengekspor ke luar daerah.

Dari hasil perhitungan indeks Location Quotient (LQ) Kabupaten Belu dari tahun 2011-2015 maka dapat teridentifikasi sektor-sektor basis dan non basis. Dari hasil perhitungan LQ terdapat 7 (tujuh) sektor basis yaitu sektor dengan indeks nilai LQ lebih besar satu ($LQ > 1$) adalah sektor transportasi dan pergudangan, jasa keuangan dan asuransi, real estat,

administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta jasa lainnya. Hal ini berarti bahwa sektor-sektor tersebut mampu menghasilkan komoditi sesuai permintaan yang ada di dalam daerahnya dan juga dapat mengeksport komoditi yang ada di sektor tersebut ke luar daerah. Perkembangan sektor menunjukkan Sektor transportasi dan pergudangan dengan indeks nilai LQ dari 1,12 persen hingga 1,14 persen. Kemudian sektor basis lainnya yaitu sektor jasa keuangan dan asuransi dengan indeks nilai LQ dari 1,14 hingga 1,18 persen dan sektor real estat dengan indeks nilai LQ dari 1,22 hingga 1,34 persen. Dan seterusnya sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan indeks nilai LQ dari 1,34 hingga 1,35 persen, dan sektor jasa pendidikan dengan indeks nilai LQ dari 1,56 hingga 1,61 persen. Selanjutnya sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan indeks nilai LQ dari 1,10 hingga 1,14 persen serta sektor jasa lainnya dengan indeks nilai LQ tertinggi dari 2,04 hingga 2,08 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa ke-7 sektor tersebut merupakan sektor yang unggul/dominan di daerah Kabupaten Belu. Selain itu sektor ini juga mampu memenuhi permintaan dalam wilayah dan mempunyai kelebihan untuk dijadikan komoditi ekspor. Sedangkan LQ sektor yang merupakan sektor non basis yaitu sektor dengan indeks nilai LQ lebih kecil satu ($LQ < 1$) adalah sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalan, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas,

sektor pengadaan air, pengolahansampah, limbah dan daur ulang, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi serta sektor jasa perusahaan. Meskipun sektor-sektor yang dikategorikan non basis dianggap kurang potensial tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena bisa jadi dengan adanya bantuan dari sektor basis maka dapat menunjang pengembangan sektor yang non basis menjadi sektor basis yang baru.

5.2 Analisis Shift Share Keunggulan Kompetitif dan Spesialisasi

Analisis *Shift Share* digunakan untuk mengetahui proses pertumbuhan Kabupaten Belu yang dikaitkan dengan perekonomian daerah yang menjadi daerah referensinya, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Analisis *Shift Share* dalam penelitian ini menggunakan variabel pendapatan, yaitu PDRB untuk menguraikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu. Berdasarkan tabel pertumbuhan komponen *proportional* Kabupaten Belu tahun 2011-2015 ternyata ada yang bernilai positif dan negatif. Nilai *Proportional* positif berarti perekonomian Kabupaten Belu berspesialisasi pada sektor yang sama yang tumbuh cepat pada Provinsi NTT. Sebaliknya apabila nilai *Proportional* negatif, berarti perekonomian Kabupaten Belu berspesialisasi pada sektor yang sama dan tumbuh lambat pada perekonomian Provinsi NTT. Sektor-sektor yang memiliki nilai komponen pertumbuhan *proportional* positif yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor

konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan dan sektor jasa lainnya.

Nilai *Differential Shift* (D) sektor perekonomian Kabupaten Belu selama periode tahun 2011-2015 ada yang positif dan ada yang negatif. Nilai *Differential* positif menunjukkan bahwa terdapat sektor ekonomi Kabupaten Belu tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor yang sama dengan Provinsi NTT. Dan jika nilai *Differential* adalah negatif menunjukkan bahwa sektor tersebut tumbuh lebih lambat dibandingkan sektor yang sama pada tingkat Provinsi NTT. Terdapat lima sektor dalam perekonomian Kabupaten Belu dengan nilai *Differential* positif, yaitu sektor pertambangan dan penggalian dengan nilai *Differential* 4.049,82, sektor industri pengolahan dengan nilai *Differential* sebesar 1.711,73, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dengan nilai *Differential* sebesar 1,00, sektor real estat dengan nilai sebesar 5.168,69, dan sektor jasa perusahaan dengan nilai sebesar 325,91.

Sektor-sektor tersebut adalah sektor dengan pertumbuhannya cepat sehingga berpotensi untuk dikembangkan dalam memacu pertumbuhan PDRB Kabupaten Belu. Sedangkan sektor lainnya yaitu sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, sektor perdagangan listrik dan gas, sektor konstruksi, sektor

perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta sektor jasa lainnya, memiliki nilai *Differential* yang negatif sehingga sektor-sektor tersebut pertumbuhannya lambat.

Tabel 5.2
Hasil Perhitungan Nilai Shift Share Kabupaten Belu Tahun
2011-2015

	Lapangan usaha/sector	Provincial Share (Nij)	Proportional (Mij)	Differential (C'ij)	Total perubahan
A	Pertanian, kehutanan dan perikanan	162.119,90	-80.391,04	-968,27	-78.422,77
B	Pertambangan Dan Penggalian	4.420,86	98,46	4.049,82	-3.951,36
C	Industri Pengolahan	4.997,02	-403,53	1.711,73	-2.115,26
D	Pengadaan Listrik Dan Gas	271,67	341,48	-185,20	526,68
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	160,97	-1,18	1,00	-2,18
F	Konstruksi	30.731,60	7.657,19	-15.984,21	23.641,40
G	Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mmobil Dan Sepeda Motor	42.536,38	9.399,92	-15.646,19	25.046,11
H	Transportasi Dan Pergudangan	30.485,25	2.750,51	-4.801,94	7.552,44
I	Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	466,82	99,67	-1.392,77	1.492,43
J	Informasi Dan Komunikasi	29.111,48	9.399,13	-22.538,08	31.937,21
K	Jasa Keuangan Dan Asuransi	20.663,46	21.347,56	-7.310,70	28.658,26
L	Real Estat	17.586,19	-1.980,80	5.168,69	-7.149,48
M N	Jasa Perusahaan	670,48	56,33	325,91	-269,58
O	Administrasi Pemerintahan , Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	86.011,31	32.094,84	-7.411,65	39.506,49
P	Jasa Pendidikan	74.717,90	10.226,06	-11.191,84	21.417,90
Q	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	13.342,31	-41,25	-4.649,49	4.608,24
R S T U	Jasa Lainnya	25.743,45	9.267,14	-1.520,28	-7.746,85

Sumber : Hasil Olahan Data Sekunder 2017

5.2.1 Efek Alokasi Sektor Perekonomian

Efek alokasi adalah komponen dalam *Shift Share* yang menunjukkan apakah suatu daerah terspesialisasi dengan sektor perekonomian yang ada dimana akan diperoleh keunggulan kompetitif. Semakin besar nilai efek alokasi semakin baik pendapatan atau kesempatan kerja didistribusikan diantara sektor perekonomian dengan keunggulan masing-masing. Efek alokasi ini untuk sektor perekonomian secara umum dapat dilihat pada tabel 5.3 :

Tabel 5.3
Efek Alokasi Sektor Perekonomian Kabupaten Belu Tahun 2011-2015 (Dalam Juta Rupiah)

	Lapangan usaha/sector	Efek Alokasi (Aij)
A	Pertanian, kehutanan dan perikanan	62,20967075
B	Pertambangan Dan Penggalian	-1759,242355
C	Industri Pengolahan	-470,0190681
D	Pengadaan Listrik Dan Gas	1,847013862
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	-0,590265535
F	Konstruksi	7060,32752
G	Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	4362,784558
H	Transportasi Dan Pergudangan	-678,1181562
I	Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	1181,381975
J	Informasi Dan Komunikasi	7468,070461
K	Jasa Keuangan Dan Asuransi	-1367,122532
L	Real Estat	1138,124006
MN	Jasa Perusahaan	-185,9169993
O	Administrasi Pemerintahan , Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	-2593,192228
P	Jasa Pendidikan	-6695,326133
Q	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	-717,8610729
RSTU	Jasa Lainnya	-1573,630304
Total		5233,72609

Sumber : HasilOlahan Data Sekunder 2017

Berdasarkan efek alokasi pada tabel tersebut di atas, bahwa sektor perekonomian di Kabupaten Belu mempunyai alokasi PDRB yang baik untuk setiap sektor perekonomian yang ada. Hal ini bisa dilihat dari nilai total efek alokasi yang bernilai positif yang berarti semakin baik PDRB didistribusikan di antara sektor-sektor yang berbeda sesuai dengan kelebihan masing-masing sektor tersebut. Dilihat dari distribusi per sektor ternyata sektor informasi dan komunikasi mendapatkan keuntungan yang paling tinggi yaitu sebesar Rp 7468,070461 juta, disusul sektor konstruksi sebesar Rp 7060,32752 juta, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp 4362,784558 juta, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar Rp 1181,381975 juta, sektor real estat sebesar 1138,124006 juta, sektor pertanian, perkebunan dan perikanan sebesar Rp 62,20967075 juta, dan sektor pengadaan listrik dan gas Rp 1,847013862 juta. Dari analisis efek alokasi ternyata sektor informasi dan komunikasi di Kabupaten Belu termasuk dalam nilai efek alokasi positif yang lebih tinggi, artinya sektor informasi dan komunikasi merupakan salah satu sektor yang mempunyai potensi sebagai penyumbang pendapatan daerah Kabupaten Belu. Jika dilihat dari sisi keunggulan dan sisi spesialisasi sektor maka dapat dilihat pada tabel 5.4 berikutini :

Tabel 5.4
Kemungkinan Efek Alokasi Sektor Perekonomian Kabupaten Belu Tahun
2011-2015

	Lapangan usaha/sektor	Efek Alokasi (A _{ij})	Spesialisasi (E _{ij} -E' _{ij})	Keuntungan Kompetitif (rij-rin)	Keterangan /kode
A	Pertanian, kehutanan dan perikanan	62,20967075	-47.560,5	-0,0	2
B	Pertambangan Dan Penggalian	-1759,242355	-14.507,6	0,1	3
C	Industri Pengolahan	-470,0190681	-8.081,9	0,1	3
D	Pengadaan Listrik Dan Gas	1,847013862	-11,7	-0,2	2
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	-0,590265535	-996,6	0,0	2
F	Konstruksi	7060,32752	-103.888,0	-0,1	2
G	Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	4362,784558	-70.273,8	-0,1	2
H	Transportasi Dan Pergudangan	-678,1181562	16.118,3	-0,1	1
I	Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	1181,381975	-11.147,4	-0,1	2
J	Informasi Dan Komunikasi	7468,070461	-61.640,8	-0,1	2
K	Jasa Keuangan Dan Asuransi	-1367,122532	13.909,4	-0,1	1
L	Real Estat	1138,124006	13.560,0	0,1	4
M N	Jasa Perusahaan	-185,9169993	-3.804,5	0,0	2
O	Administrasi Pemerintahan , Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	-2593,192228	95.255,3	-0,0	1
P	Jasa Pendidikan	-6695,326133	119.499,0	-0,1	1
Q	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	-717,8610729	7.624,7	-0,1	1
RS TU	Jasa Lainnya	-1573,630304	55.946,2	-0,0	1

Sumber : Hasil Olahan Data Sekunder 2017

Keterangan kode :

1. Tidak memiliki keunggulan kompetitif namun terspesialisasi (Competitif disadvantage, Specialized)
2. Tidak memiliki keunggulan kompetitif dan terspesialisasi (Competitif disadvantage, not Specialized)
3. Memiliki keunggulan kompetitif namun tidak terspesialisasi (Competitif advantage, not Specialized)
4. Memiliki keunggulan kompetitif dan terspesialisasi (Competitif advantage, Specialized).

Berdasarkan pada tabel di atas terlihat bahwa sektor real estat di Kabupaten Belu merupakan sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan terspesialisasi. Kategori ini meliputi kategori persewaan, agen dan atau perantara dalam penjualan atau pembelian real estat serta penyediaan jasa real estat lainnya bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak. Kategori ini juga mencakup kegiatan pembangunan gedung, pemeliharaan atau penyewaan bangunan. Real estat adalah property berupa tanah dan bangunan.

Kategori real estat memberikan kontribusi relatif stabil bagi PDRB Kabupaten Belu dengan peranan di atas 3 persen. Selama tahun 2011-2015, secara berturut-turut sumbangan real estat sebesar 3,23 persen, 3,31 persen, 3,29 persen, dan 3,26 persen. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi kategori ini berturut-turut dari tahun 2011-2015 yaitu sebesar 7,08 persen, 5,52 persen, 5,34 persen, 6,83 persen dan 8,78 persen. Kondisi ini akan memperkuat keuntungan kompetitif sektor real estat di Kabupaten Belu. Spesialisasi sektor real estat yang terjadi di Kabupaten Belu disebabkan karena adanya kebijakan

pemerintah daerah yang menjadikan sektor real estat sebagai sektor yang dikategori dalam sektor prioritas atau unggulan untuk menopang pembangunan wilayah bersangkutan. Hal ini diperkuat dengan relatif masih tingginya kontribusi sektor real estat terhadap PDRB Kabupaten Belu selama lima tahun terakhir dengan rata-rata kontribusi sektornya sebesar 3,274 persen dan rata-rata laju pertumbuhannya sebesar 6,71 persen.

5.3 Klasifikasi Pertumbuhan dan Pendapatan Perkapita Kabupaten Belu Berdasarkan Tipology Klassen

Metode Klassen Tipology digunakan untuk mengetahui pengelompokan daerah Kabupaten Belu dan Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut struktur pertumbuhannya. Dengan menggunakan Matrix Klassen Tipology dapat dilakukan empat pengelompokan daerah dengan menggunakan laju pertumbuhan dan pendapatan perkapita sebagai indikator. Berikut ini disajikan laju pertumbuhan dan pendapatan perkapita Kabupaten Belu dan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2011-2015 dalam tabel 5.5 berikut ini :

Tabel 5.5
Laju Pertumbuhan dan Pendapatan Perkapita Kabupaten Belu dan
Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2011-2015

No.	Tahun	Kabupaten Belu		Provinsi NTT	
		Laju Pertumbuhan PDRB (%)	PDRB Perkapita (Rp)	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	PDRB Perkapita (Rp)
1	2011	4,29	9.923.039	5,67	9.675.887
2	2012	5,25	10.259.303	5,46	10.030.981
3	2013	6,04	10.679.553	5,41	10.396.757
4	2014*)	5,57	11.092.074	5,05	10.741.985
5	2015**)	5,49	11.503.593	5,02	11.097.543

Sumber : Hasil olahan Data Sekunder tahun 2017

Keterangan : *)angka sementara **) angka sangat sementara

Untuk melihat tingkat kemakmuran daerah secara kasar, perlu di analisis nilai PDRB laju pertumbuhan dan perkapita untuk masing-masing daerah. Sebagaimana terlihat pada tabel 5.2, bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB perkapita. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2015, PDRB perkapita Kabupaten Belu mencapai 11.503.593 juta rupiah. Hal ini berarti pada tahun 2015 PDRB perkapita di Kabupaten Belu mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2015, PDRB perkapitanya mencapai 11.097.543 juta rupiah dengan pertumbuhan sebesar 5,67 persen pada tahun 2011 dan berturut-turut sebesar 5,46; 5,41; 5,05; 5,02 persen pada tahun 2012 hingga 2015.

Selanjutnya dengan menggunakan Tipology Klassen, dapat pula diketahui pengelompokan daerah Kabupaten Belu dan Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut struktur pertumbuhannya. Dengan menggunakan Martix Klassen dapat dilakukan pengelompokan daerah dengan menggunakan laju pertumbuhan dan pendapatan perkapita sebagai indikator. Namun demikian perlu dicatat pengelompokan ini adalah bersifat dinamis karena sangat bergantung pada pengembangan kegiatan pembangunan daerah yang bersangkutan. Ini berarti dalam beberapa tahun kedepan, pengelompokan akan dapat berubah sesuai dengan laju pertumbuhan dan pendapatan perkapita

daerah yang bersangkutan. Perubahan tersebut akan mudah terjadi pada daerah-daerah yang kondisinya telah berada dekat dengan batas rata-rata dari tingkat pertumbuhan dan pendapatan perkapita. Hasil analisis dengan menggunakan Tipology Klassen untuk data laju pertumbuhan dan pendapatan perkapita tahun 2011-2015, disajikan dalam tabel 5.6, tabel 5.7, tabel 5.8, tabel 5.9, tabel 5.10, berikut ini :

Tabel 5.6
Pengelompokan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belu Tahun 2011 Berdasarkan Tipology Klassen

Laju Pertumbuhan Pendapatan Perkapita	Laju Pertumbuhan Diatas Rata-rata	Laju Pertumbuhan Dibawah Rata-rata
Pendapatan Perkapita Diatas Rata-rata	<u>Daerah Maju</u> -	<u>Daerah Maju Tapi Tertekan</u> Belu
Pendapatan Perkapita Dibawah Rata-rata	<u>Daerah Berkembang</u> -	<u>Daerah Relatif Terbelakang</u> -

Sumber : Hasil Analisis Data Sekunder 2017

Berdasarkan tabel 5.6, menunjukkan pengelompokan daerahkabupaten Belu berdasarkan Tipology Klassen Pada tahun 2011,

dimana Kabupaten Belu termasuk dalam pengelompokan daerah maju tapi tertekan, dikarenakan laju pertumbuhan ekonominya lebih rendah dari Provinsi NTT, akan tetapi pendapatan perkapita daerahnya lebih tinggi.

Pada tahun 2012, Kabupaten Belu masih termasuk dalam pengelompokan daerah maju tapi tertekan, dimana pendapatan perkapita daerahnya lebih tinggi dari Provinsi NTT, sedangkan pertumbuhan ekonominya lebih rendah dari Provinsi NTT.

Tabel 5.7
Pengelompokan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belu Tahun 2012
Berdasarkan Tipology Klassen

Laju Pertumbuhan Pendapatan Perkapita	Laju Pertumbuhan Diatas Rata-rata	Laju Pertumbuhan Dibawah Rata-rata
Pendapatan Perkapita Diatas Rata-rata	<u>Daerah Maju</u> -	<u>Daerah Maju Tapi Tertekan</u> Belu
Pendapatan Perkapita Dibawah Rata-rata	<u>Daerah Berkembang</u> -	<u>Daerah Relatif Terbelakang</u> -

Sumber : Hasil Analisis Data Sekunder 2017

Tabel 5.8, menunjukkan pengelompokan daerah pada tahun 2013 tetap sama jika dibandingkan dengan tahun 2012, dimana Kabupaten Belu masih termasuk dalam kelompok daerah maju tapi tertekan dengan pendapatan perkapitanya lebih tinggi dari Provinsi NTT, tetapi tingkat laju pertumbuhan ekonominya lebih rendah.

Tabel 5.8
Pengelompokan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belu Tahun 2013
Berdasarkan Tipology Klassen

Laju Pertumbuhan Pendapatan Perkapita	Laju Pertumbuhan Diatas Rata-rata	Laju Pertumbuhan Dibawah Rata-rata
Pendapatan Perkapita Diatas Rata-rata	<u>Daerah Maju</u> =	<u>Daerah Maju Tapi Tertekan</u> Belu
Pendapatan Perkapita Dibawah Rata-rata	<u>Daerah Berkembang</u> -	<u>Daerah Relatif Terbelakang</u> -

Sumber : Hasil Analisis Data Sekunder 2017

Tabel 5.9
Pengelompokan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belu Tahun 2014
Berdasarkan Typology Klassen

Laju Pertumbuhan Pendapatan Perkapita	Laju Pertumbuhan Diatas Rata-rata	Laju Pertumbuhan Dibawah Rata-rata
Pendapatan Perkapita Diatas Rata-rata	<u>Daerah Maju</u> -	<u>Daerah Maju Tapi Tertekan</u> Belu
Pendapatan Perkapita Dibawah Rata-rata	<u>Daerah Berkembang</u> -	<u>Daerah Relatif Terbelakang</u> -

Sumber : Hasil Analisis Data Sekunder 2017

Tabel 5.9, menunjukkan pengelompokan daerah pada tahun 2014 jika dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya masih tetap sama, yaitu Kabupaten Belu masih saja termasuk dalam kelompok daerah maju tapi tertekan dimana pendapatan perkapitanya lebih tinggi dari Provinsi NTT, tetapi tingkat laju pertumbuhan ekonomi lebih rendah.

Selanjutnya Tabel 5.10, menunjukkan pengelompokan daerah pada tahun 2015, dimana Kabupaten Belu tetap bertahan dalam kelompok daerah maju tapi tertekan dimana pendapatan perkapitanya lebih tinggi dari Provinsi NTT, tetapi tingkat laju pertumbuhan ekonomi daerahnya lebih rendah.

Tabel 5.10
Pengelompokan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belu Tahun 2015
Berdasarkan Tipology Klassen

Laju Pertumbuhan Pendapatan Perkapita	Laju Pertumbuhan Diatas Rata-rata	Laju Pertumbuhan Dibawah Rata-rata
Pendapatan Perkapita Diatas Rata-rata	<u>Daerah Maju</u> -	<u>Daerah Maju Tapi Tertekan</u> Belu
Pendapatan Perkapita Dibawah Rata-rata	<u>Daerah Berkembang</u> -	<u>Daerah Relatif Terbelakang</u> -

Sumber : Hasil Analisis Data Sekunder 2017

Untuk memperjelas pemahaman, maka dihubungkan antara perkembangan daerah berdasarkan klasifikasi pertumbuhan dan pendapatan perkapita dengan sektor basis/unggul serta memiliki keunggulan kompetitif dan spesialisasi sektor di Kabupaten Belu. Berdasarkan analisis LQ, *Shift*

Sharedan Tipology Klassen, di ketahui bahwa pada tahun 2011-2015, Kabupaten Belu termasuk dalam kategori pengelompokan daerah maju tapi tertekan, dimana pendapatan perkapitanya lebih tinggi dari Provinsi NTT, tetapi tingkat laju pertumbuhan ekonominya lebih rendah. Kabupaten Belu masih termasuk dalam daerah maju tapi tertekan, hal ini sejalan dengan analisis LQ yang menunjukkan bahwa Kabupaten Belu hanya memiliki beberapa sektor basis/unggul yang terdiri dari sektor transportasi dan pergudangan dengan indeks nilai LQ sebesar 1,12 hingga 1,14 persen, sektor jasa keuangan dan asuransi dengan indeks nilai LQ sebesar 1,14 hingga 1,18 persen dan sektor real estat dengan indeks nilai LQ sebesar 1,22 hingga 1,34 persen. Dan seterusnya sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan indeks nilai LQ sebesar 1,34 hingga 1,35 persen, dan sektor jasa pendidikan dengan indeks nilai LQ sebesar 1,56 hingga 1,61 persen Selanjutnya sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan indeks nilai LQ sebesar 1,10 hingga 1,14 persen serta sektor jasa lainnya dengan indeks nilai LQ sebesar 2,03 hingga 2,08 persen.

Selain itu berdasarkan analisis LQ, sebagian sektor tidak merupakan sektor basis/unggulan. Sejalan dengan itu berdasarkan analisis *Shift Share* ada beberapa sektor yang memiliki spesialisasi dan keunggulan kompetitif. Pada tahun 2011-2015, sektor yang mempunyai nilai komponen pertumbuhan *Proportional Shift* positif yaitu sektor pertambangan dan penggalian dengan nilai 98,46; diikuti sektor pengadaan listrik dan gas dengan nilai 341,48;

sektor konstruksi dengan nilai 7.567,19; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan nilai 9.399,92; sektor transportasi dan pergudangan dengan nilai 2.750,51; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dengan nilai 99,67; sektor informasi dan komunikasi dengan nilai 9.399,13; sektor jasa keuangan dan asuransi dengan nilai 21.347,56; sektor jasa perusahaan dengan nilai 56,33; sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan nilai 32.094,84; sektor jasa pendidikan dengan nilai 10.225,06 dan sektor jasa lainnya dengan nilai 9.267,14.

Selanjutnya sektor dengan nilai komponen *Differential Shift* yaitu sektor pertambangan dan penggalian dengan nilai *Differential* 4.049,82; diikuti sektor industri pengolahan dengan nilai *Differential* sebesar 1.711,73; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dengan nilai *Differential* sebesar 1,00; sektor real estat dengan nilai sebesar 5.168,69; dan sektor jasa perusahaan dengan nilai sebesar 325,91. Sektor-sektor tersebut adalah sektor dengan pertumbuhan lebih cepat dan memiliki daya saing yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan sektor yang sama pada perekonomian Provinsi. Selanjutnya dengan melihat nilai total efek alokasi yang bernilai positif, maka dari distribusi per sektor ternyata sektor informasi dan komunikasi mendapat keuntungan yang paling tinggi yaitu sebesar 7468,070461 juta, yang merupakan salah satu sektor yang mempunyai potensi sebagai penyumbang pendapatan daerah Kabupaten Belu.

Jika dari sisi spesialisasi dan keunggulan kompetitif dengan kemungkinan efek alokasi sektor diketahui salah satu sektor yaitu sektor real estat dengan nilai efek alokasi kedua sisinya positif. Kondisi ini akan memperkuat keuntungan kompetitif dan spesialisasi sektor real estat karena adanya kebijakan pemerintah daerah yang menjadikan sektor tersebut sebagai sektor prioritas atau unggulan untuk menopang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita Kabupaten Belu agar dapat masuk dalam kategori daerah maju.